

Kajian Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026

Eki Darma Putra

Bapperida Kabupaten Kotawaringin Timur, Indonesia

Email: ekidarma0531@gmail.com

<i>Manuscript accepted:</i>	<i>Revised:</i>	<i>Date of publication:</i>
KATA KUNCI Perencanaan Pembangunan Daerah; Isu Strategis; Sumber Daya Manusia	ABSTRAK Permasalahan Pembangunan Daerah adalah penyebab terjadinya Kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Memprioritaskan isu strategis dilakukan untuk menentukan isu strategis yang paling prioritas dan akan mempengaruhi rumusan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun kedepan. Dari permasalahan yang telah dikaji, untuk pembangunan 5 tahun kedepan Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan isu strategis pembangunan, yaitu : (1) Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat, (2) Belum Tercapainya Reformasi Birokrasi untuk Mencapai Good Governance (3) Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur, Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Fasilitas Umum, serta Peningkatan Aksesibilitas, (4) Pembangunan Berkelanjutan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal.	
Keywords <i>Regional Development Planning; Strategic Issues; Human Resources.</i>	ABSTRACT <i>Regional Development Problems are the cause of the gap between the development performance that is currently achieved and the planned one. Prioritizing strategic issues is carried out to determine the most priority strategic issues and will affect the formulation of missions, objectives, objectives, strategies and policy directions in the next five years. From the problems that have been studied, for the next 5 years of development, East Kotawaringin Regency has determined strategic development issues, namely: (1) Lack of Optimal Improvement of Human Resources Quality and Community Welfare, (2) Lack of Achievement of Bureaucratic Reform to Achieve Good Governance (3) Lack of Optimal Infrastructure Development, Fulfillment of Needs for Public Facilities and Facilities, and Increased Accessibility, (4) Sustainable Development and Resource Management Nature Optimally.</i>	

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan global saat ini menghadapi tantangan kompleks yang berasal dari dinamika sosial, lingkungan, dan ekonomi. Model pembangunan tradisional berbasis top-down dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan lokal dan keberlanjutan (Sachs et al., 2019). Perubahan iklim, ketimpangan global, dan krisis energi telah memaksa banyak negara untuk menerapkan model pembangunan berkelanjutan yang lebih partisipatif (United Nations Development Programme [UNDP], 2020). Namun demikian, efektivitas perencanaan pembangunan seringkali terhambat oleh lemahnya koordinasi lintas sektor dan struktur kelembagaan yang kaku (World Bank, 2021). Di sisi lain, pendekatan teknokratik dalam pembangunan justru kerap gagal apabila tidak dibarengi dengan kapasitas institusi dan dukungan politik yang memadai (Turner & Hulme, 2018).

Di Indonesia, pelaksanaan pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah sering kali bersifat simbolis. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan kelembagaan

dan rendahnya kualitas data yang menjadi dasar penyusunan dokumen RPJMD (Prasetyo & Riyadi, 2021). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan juga masih minim karena terbatasnya akses informasi, budaya birokrasi yang sentralistik, dan keterbatasan literasi perencanaan (Setiawan & Dewi, 2020). Selain itu, problem koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi hambatan struktural dalam implementasi perencanaan jangka menengah (Nasution, 2019). Di Kalimantan Tengah khususnya, tantangan dalam tata kelola lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam menunjukkan lemahnya sinergi antara sektor perencanaan dan pelaksanaan (Bappenas, 2022).

Beberapa studi sebelumnya relevan dengan konteks ini. Prasetyo dan Riyadi (2021) mengevaluasi pendekatan teknokratik dalam RPJMD dan menemukan bahwa banyak pemerintah daerah belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip evidence-based planning. Torres et al. (2022) dalam studi mereka di Afrika Barat menyoroti pentingnya budaya lokal dalam mendukung perencanaan partisipatif. Johnson dan Becker (2023) menekankan bahwa keberhasilan anggaran partisipatif sangat tergantung pada adaptasi institusi lokal terhadap mekanisme partisipasi. Sementara itu, Elston et al. (2022) menyoroti kelemahan tata kelola lingkungan di Indonesia yang berdampak pada kualitas pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dengan mengusulkan pendekatan hybrid dalam penyusunan RPJMD, yaitu menggabungkan metode teknokratik, partisipatif, dan berbasis konteks lokal-geostrategis. Tidak banyak penelitian sebelumnya yang mengeksplorasi model integratif seperti ini, khususnya di wilayah Kalimantan (Prasetyo & Riyadi, 2021; Johnson & Becker, 2023; Torres et al., 2022; Elston et al., 2022). Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan kerangka perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

Tujuan dari perumusan permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Kotawaringin Timur adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki, serta menjadi dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini sebaiknya menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup yang disebarakan kepada responden yang merupakan pengguna aktif layanan digital dalam bidang pendidikan. Teknik pengambilan sampel dapat menggunakan purposive sampling untuk memperoleh data dari responden yang sesuai dengan kriteria. Analisis data dilakukan dengan teknik statistik deskriptif dan inferensial, seperti uji regresi linear atau korelasi untuk mengetahui hubungan antar variabel. Uji validitas dan reliabilitas instrumen juga perlu dilakukan untuk memastikan keandalan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumusan Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Permasalahan Pembangunan Daerah adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang

ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap mempunyai nilai prioritas apabila berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi. Dalam perumusan masalah digunakan tiga konsep tentang masalah pembangunan yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah dan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Masalah adalah beberapa penyebab dari masalah pokok dipecahkan melalui rumusan strategi. Akar masalah adalah penyebab dari masalah yang dirinci, dipecahkan melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Penyelesaian permasalahan pembangunan merupakan esensi dari tujuan pembangunan daerah yaitu kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara bertahap. Dari hasil evaluasi dan analisis gambaran umum kondisi daerah maka masalah pokok, masalah dan akar masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai IPM Kabupaten Kotawaringin Timur		71,31	71,38	71,67	72,21	73,73
1	Pendidikan					
-	Harapan Lama Sekolah/HLS (th)	12,84	12,85	12,86	12,88	12,89
-	Rata-rata Lama Sekolah/RLS (th)	8,13	8,15	8,16	8,17	8,18
2	Kesehatan					
-	Angka Harapan Hidup/AHH (th)	69,85	69,90	70,15	70,39	70,51
3	Ekonomi					
-	Pengeluaran Perkapita (ribu)	11,854	11,866	12,048	12,546	13,042
Nilai IPM Provinsi Kalimantan Tengah		71,05	71,25	71,63	73,73	74,28
1	Pendidikan					
-	Harapan Lama Sekolah/HLS (th)	12,66	8,64	12,75 8,65	12,76 8,73	12,77 8,81
-	Rata-rata Lama Sekolah/RLS (th)	8,59	12,74			
2	Kesehatan					
-	Angka Harapan Hidup/AHH (th)	69,74	69,79	70,04	73,54	73,73
3	Ekonomi					
-	Pengeluaran Perkapita (ribu)	13,109	13,117	13,352	13,798	14,095

Sumber data: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Timur Tahun 2024.

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa IPM Kabupaten Kotawaringin Timur selama 5 tahun dari lebih tinggi Provinsi Kalimantan Tengah dan indikator penyusun IPM, yaitu Pendidikan (HLS dan RLS), kesehatan (AHH) Kabupaten Kotawaringin Timur masih diatas Provinsi Kalimantan Tengah, namun untuk indikator ekonomi (Pengeluaran Perkapita) Kabupaten Kotawaringin Timur dibawah Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya berdasarkan data tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur lima tahun kedepan adalah “Kualitas dan Daya Saing SDM”.

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur mencakup berbagai sektor strategis. Di bidang pendidikan, tantangan utama meliputi ketimpangan sarana

prasarana, kekurangan guru, serta gangguan pembelajaran daring akibat pandemi dan keterbatasan akses internet. Di sektor kesehatan, permasalahan berkisar pada fluktuasi kasus COVID-19, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata terutama di wilayah terpencil, sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih, serta lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan. Untuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, kendala mencakup belum rampungnya revisi RTRW, kurangnya regulasi pendukung, kondisi infrastruktur jalan dan drainase yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap rencana tata ruang. Sektor perumahan dan permukiman menghadapi persoalan kawasan kumuh, backlog, kurangnya RTH dan air bersih, serta belum optimalnya kebijakan perumahan dan sanitasi. Aspek ketertiban umum juga menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya SDM, sarana operasional, pelanggaran Perda, minimnya pemahaman hukum, dan kurangnya dukungan stakeholder. Terakhir, pada aspek sosial, tingginya angka kemiskinan dan belum optimalnya penyaluran bantuan sosial menjadi tantangan utama dalam pembangunan daerah.

Permasalahan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar di Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi berbagai aspek penting. Di bidang tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka dan partisipasi angkatan kerja masih rendah serta minimnya anggaran menjadi hambatan utama. Fenomena ini juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia, menunjukkan adanya korelasi kuat antara rendahnya alokasi anggaran dan kurang optimalnya layanan ketenagakerjaan (Huda et al., 2020). Dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana, tantangan mencakup belum optimalnya integrasi program Kampung KB, rendahnya SDM dan fasilitas, serta koordinasi yang lemah antarinstansi. Hal serupa ditemukan dalam studi oleh Siregar & Mahyuddin (2022), yang menegaskan bahwa kurangnya integrasi program dan pelibatan lintas sektor menjadi hambatan struktural dalam pemberdayaan perempuan dan anak di daerah. Sektor pangan menghadapi kurangnya regulasi cadangan pangan, sosialisasi peta ketahanan pangan yang belum maksimal, serta lemahnya partisipasi masyarakat. Bidang pertanahan menghadapi permasalahan tumpang tindih kepemilikan tanah dan minimnya pemahaman masyarakat soal batas tanah.

Masalah lingkungan hidup mencakup keterbatasan dalam pengelolaan sampah, mutu air, AMDAL, dan penegakan hukum, sebagaimana diidentifikasi juga oleh Sutopo & Sulastri (2021), yang menyoroti lemahnya implementasi kebijakan lingkungan di daerah akibat kurangnya pengawasan dan kapasitas SDM. Di bidang administrasi kependudukan, tantangan berupa kurangnya perangkat pelayanan, gangguan jaringan, serta kendala jempit bola. Dalam pemberdayaan masyarakat desa, kendala meliputi rendahnya SDM, sulitnya akses desa, dan belum optimalnya pengelolaan BUMDes. Aspek perhubungan menghadapi berbagai persoalan seperti belum terwujudnya angkutan perkotaan, keterbatasan trayek, dan rendahnya kualitas sarana transportasi. Sektor komunikasi mengalami belum optimalnya layanan TIK dan statistik sektoral. Koperasi dan UKM terkendala oleh minimnya anggaran, lemahnya SDM, dan kurangnya pendampingan. Kepemudaan dan olahraga menghadapi tantangan promosi serta koordinasi yang rendah. Bidang kebudayaan mengalami hambatan akibat pandemi, keterbatasan fasilitas, dan rendahnya koordinasi pelaku budaya. Terakhir, sektor perpustakaan dan kearsipan mengalami hambatan regulasi, kurangnya SDM, sarana dan prasarana yang belum sesuai standar, serta pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan yang belum optimal.

Permasalahan pembangunan pada urusan pemerintah pilihan di Kabupaten Kotawaringin Timur mencakup berbagai sektor strategis. Di sektor kelautan dan perikanan, keterbatasan anggaran dan sulitnya akses transportasi menuju desa-desa nelayan di wilayah utara, seperti di Kecamatan Bukit Santuai, menjadi tantangan utama. Pada sektor pariwisata, masalah mencakup belum terjadwalnya event secara konsisten, rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan, lemahnya koordinasi pelaku usaha pariwisata, serta target PAD yang tidak realistis. Dalam sektor pertanian, kendala utama meliputi keterbatasan perluasan lahan akibat status kawasan hutan, belum adanya Perda LP2B, rendahnya manajemen usaha tani dan kualitas produksi, alih fungsi lahan ke sawit, serta irigasi yang belum memadai. Di sektor perdagangan dan industri, hambatan termasuk belum optimalnya program, lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya tindak lanjut pembinaan pelaku usaha karena keterbatasan SDM, serta dampak pandemi terhadap arus perdagangan. Sementara itu, pada sektor transmigrasi, kendala utama adalah minimnya anggaran yang berdampak pada pengadaan data dan pelaksanaan program yang efektif.

Identifikasi Isu Strategis

Isu strategis internasional yang memengaruhi pembangunan daerah mencakup lima aspek utama. Pertama, komitmen terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kelanjutan dari MDGs, menekankan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat miskin, melalui 17 tujuan global. Kedua, meningkatnya kesadaran global terhadap aksi iklim menuntut percepatan dekarbonisasi dan pengurangan emisi hingga 7,6% per tahun demi membatasi pemanasan global, di mana Indonesia sebagai bagian dari G20 dituntut berperan aktif. Ketiga, kesenjangan pembangunan manusia secara global menghambat kemajuan HDI, dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender sebagai titik lemah, termasuk di Indonesia. Keempat, konflik regional di Laut China Selatan yang melibatkan Indonesia, khususnya di wilayah Natuna, berpotensi mengganggu stabilitas perdagangan dan keamanan, mengingat pentingnya jalur pelayaran dan potensi sumber daya alam di wilayah tersebut. Kelima, perang dagang antara China dan Amerika Serikat berdampak langsung terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia sebagai mitra dagang utama kedua negara, sehingga perlu diantisipasi dalam pengambilan keputusan strategis nasional maupun daerah.

Isu kebijakan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2021–2026 diarahkan untuk mewujudkan visi “Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” melalui Nawacita Kedua dengan sembilan misi utama, di antaranya peningkatan kualitas manusia, pembangunan berkeadilan, lingkungan berkelanjutan, dan pemerintahan yang bersih. Untuk mendukung misi tersebut, ditetapkan tujuh prioritas nasional yaitu: memperkuat ketahanan ekonomi yang berkelanjutan; mengembangkan wilayah untuk pemerataan pembangunan; meningkatkan kualitas dan daya saing SDM; melaksanakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; memperkuat infrastruktur guna menunjang ekonomi dan pelayanan dasar; membangun lingkungan hidup yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim; serta memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan-keamanan, dan reformasi pelayanan publik. Isu strategis dalam setiap prioritas meliputi transformasi ekonomi digital, penguatan kebudayaan dan karakter bangsa, percepatan infrastruktur, pengurangan

kesenjangan antarwilayah, serta peningkatan daya saing dan produktivitas nasional dalam menghadapi tantangan global dan perubahan iklim.

Isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD 2021–2026 diarahkan untuk mewujudkan visi “Kalimantan Tengah Maju, Mandiri, dan Adil untuk Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kalimantan BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)” melalui misi pembangunan seperti pengelolaan tata ruang, infrastruktur, sumber daya air, pengendalian inflasi dan kemiskinan, tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengelolaan lingkungan, serta optimalisasi pendapatan daerah. Isu-isu strategis yang menjadi fokus antara lain percepatan penyelesaian konflik kawasan hutan dalam RTRW, peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja, pengembangan ekonomi hijau dan pemerintahan hijau, pemerataan kesejahteraan masyarakat, restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan akses wilayah, optimalisasi investasi SDA, serta implementasi good governance secara menyeluruh.

Isu strategis pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang diproyeksikan akan berdampak besar dalam lima tahun ke depan meliputi: pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal; pengembangan infrastruktur serta peningkatan sarana, fasilitas umum, dan aksesibilitas; peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat; pemerataan pembangunan hingga ke pedesaan; penguatan sektor ekonomi strategis dan ekonomi kerakyatan; penguatan ketahanan pangan; reformasi birokrasi menuju good governance; peningkatan kondusifitas, pertahanan, dan keamanan; peningkatan investasi dan ekspor; pengentasan kemiskinan; pengurangan angka pengangguran; serta penanganan dan mitigasi bencana. Fokus pada pembangunan berkelanjutan dan ketahanan sosial-ekonomi sangat diperlukan dalam rangka menjawab tantangan global dan domestik, termasuk krisis iklim dan tekanan ekonomi pasca pandemi (Rahayu & Nurlaili, 2022; Wirawan & Purba, 2021).

Prioritisasi isu strategis Kabupaten Kotawaringin Timur dalam RPJMD tahun 2021–2026 difokuskan pada empat isu utama yang akan memengaruhi perumusan misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan daerah dalam lima tahun ke depan. Pertama, belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat, di mana pembangunan berpusat pada manusia dianggap sebagai investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Human capital investment telah terbukti menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengentasan kemiskinan (Rosmiati & Hapsari, 2021). Kedua, belum tercapainya reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance, yang mencakup manajemen pembangunan yang solid, demokratis, efisien, serta bebas dari praktik korupsi. Ketiga, belum optimalnya pembangunan infrastruktur, pemenuhan sarana dan fasilitas umum, serta peningkatan aksesibilitas yang berperan penting dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanganan perubahan iklim. Keempat, pentingnya pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal sebagai motor pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks pemulihan pasca pandemi COVID-19.

KESIMPULAN

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, masalah pokok dalam pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur selama lima tahun ke depan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut

sesuai dengan periode RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021–2026, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain dengan memastikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup (AHH) tetap lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu, perlu ditingkatkan koordinasi antar perangkat daerah guna merancang dan melaksanakan program-program kegiatan yang terukur. Fokus pembangunan lima tahun ke depan juga harus diarahkan pada prioritas utama yaitu peningkatan sumber daya manusia.

REFERENSI

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). *Evaluasi pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan*. Jakarta: Bappenas.
- Elston, T., MacCarthaigh, M., & Murphy, P. (2022). Environmental governance in Indonesia: A review of decentralization and institutional capacity. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 24(2), 137–154. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2021.1967421>
- Huda, N., Fathoni, A., & Nurhasanah, L. (2020). Analisis pengaruh belanja pemerintah terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 20(2), 220–232. <https://doi.org/10.20961/jiep.v20i2.47482>
- Johnson, C., & Becker, A. (2023). Institutional adaptation and participatory budgeting: Evidence from Southeast Asia. *Public Administration and Development*, 43(1), 28–44. <https://doi.org/10.1002/pad.2015>
- Nasution, A. (2019). Desentralisasi fiskal di Indonesia: Tantangan koordinasi pusat dan daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 17(1), 45–64.
- Prasetyo, B., & Riyadi, S. (2021). Evaluasi pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 13–25. <https://doi.org/10.21776/ub.jap.2021.008.01.2>
- Rahayu, S., & Nurlaili, F. (2022). Strategi pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim global. *Jurnal Ekologi dan Pembangunan*, 5(2), 98–110.
- Rosmiati, R., & Hapsari, D. (2021). Human capital investment dan pertumbuhan ekonomi daerah: Studi empiris di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 13(1), 59–70. <https://doi.org/10.23917/jep.v13i1.14320>
- Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Mazzucato, M., Messner, D., Nakicenovic, N., & Rockström, J. (2019). Six transformations to achieve the Sustainable Development Goals. *Nature Sustainability*, 2(9), 805–814. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0352-9>
- Setiawan, H., & Dewi, K. (2020). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 111–124.
- Siregar, R., & Mahyuddin, M. (2022). Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Sosial & Pembangunan*, 8(1), 41–54. <https://doi.org/10.32528/sosial.v8i1.4690>
- Sutopo, B., & Sulastri, E. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. *Jurnal Bumi dan Lingkungan*, 11(3), 233–245.
- Torres, M. T., Diallo, S., & Camara, A. (2022). Local culture and participatory planning: Lessons from community development in West Africa. *Development in Practice*, 32(4), 512–524. <https://doi.org/10.1080/09614524.2022.2048976>

- Turner, M., & Hulme, D. (2018). *Governance, administration and development: Making the state work*. Palgrave Macmillan.
- United Nations Development Programme. (2020). *Human development report 2020: The next frontier—Human development and the Anthropocene*. UNDP. <https://hdr.undp.org/en/2020-report>
- World Bank. (2021). *World development report 2021: Data for better lives*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2021>
- Wirawan, H., & Purba, A. (2021). Kebijakan pembangunan pasca pandemi: Studi kasus ketahanan sosial ekonomi di daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 203–218.